

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2021

Damas Bagus Mahendra¹, Yuni Prihadi Utomo²

^{1,2} Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pengangguran adalah masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021. Penelitian dilakukan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, selama periode tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai alat analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai hasil estimasi terbaik. Secara parsial Upah Minimum Kabupaten dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pengangguran. Sementara, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB sektor pertanian tidak memiliki pengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2021. Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh positif harus diwaspadai oleh pemerintah, karena naiknya Upah Minimum Kabupaten dan pertumbuhan ekonomi ternyata memicu naiknya pengangguran dan pertanda dari bergesernya kegiatan produksi menjadi lebih padat modal. Pengeluaran Pemerintah yang memiliki pengaruh negatif, menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah telah dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga signifikan menurunkan pengangguran, karena harus terus dievaluasi dan dipertajam.

Kata Kunci: Pengangguran; Angkatan Kerja; Indeks Pembangunan Manusia; Upah Minimum Kabupaten; Pengeluaran Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Pertanian.

Abstract

Unemployment is very complex problem because it affects and is influenced by many factors that interact with each other in a pattern that is not always easy to understand. This study aims to review the factors that influence stimuli in the Regencies/Cities of central Java Province for the 2017-2021 period. The research was conducted in 35 regencies/cities in central Java Province, during the 2017-2021 period. This research method used panel as an analytical tool. The results of the study found that the Fixed Effect Model (FEM) estimated model was chosen as the best estimation result. Partially District Minimum Wage and Government Expenditure have an affect on Unemployment. Meanwhile, Labor Force, Human Development Index, Economic Growth and GRDP of agricultural sector have no effect on Unemployment in Municipal Districts of Central Java Province during the 2017-2021 period. Regency minimum wages and economic growth that have a positive effect must be watched out for by the government, because the increase in the District Minimum wages and economic growth actually triggered an increase in unemployment and was a sign of a shift in production activities to become more capital intensive. Government spending that has a negative effect shows that the allocation of government spending has been able to create sufficient

employment so that it significantly reduces unemployment because it must be continuously evaluated and sharpened.

Keywords: Unemployment; Workforce; Human Development Index; District Minimum Wage; Government Spending; Economic growth; Agricultural GRDP.

Copyright (c) 2019 Nama Penulis

✉ Corresponding author :
Email Address : damasbgs@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2015).

Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam ketenagakerjaan di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan tambahan tenaga kerja jauh lebih besar dibandingkan tambahan lapangan pekerjaan, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menyerap tenaga kerja yang ada di negara berkembang (Indayani & Hartono, 2020).

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Namun, kebijaksanaan pemecahan sudah barang tentu harus dialamatkan kepada apa yang menjadi penyebabnya (Saefulloh & Fitriana, 2017).

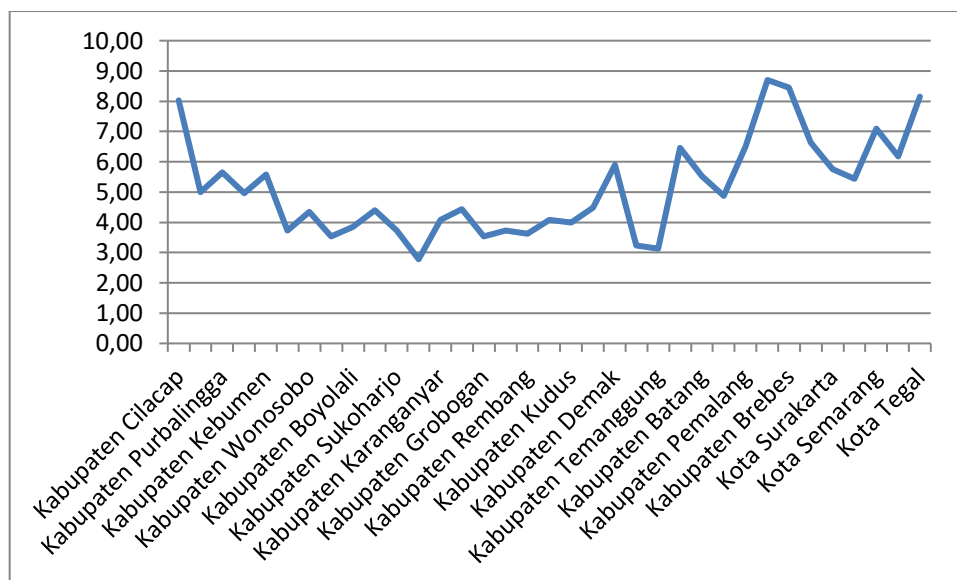
Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pasar yang besar jika dilihat dari ketersediaan jumlah tenaga kerja. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang besar seharusnya dapat menjadi penggerak perekonomian. Namun, yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini adalah bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar tidak menjadi asset potensial yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan roda perekonomian tetapi malah menjadi beban negara dalam pembangunan. Namun demikian, apabila pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menciptakan tenaga kerja yang potensial, maka akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila pertumbuhan penduduk yang cepat itu tidak menciptakan tenaga kerja yang potensial, maka akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran, karena tenaga kerja yang ada tidak digunakan di pasar tenaga kerja. Grafik 1.1 memperlihatkan

perkembangan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama Periode 2017-2021.

Grafik 1.1 menyajikan perkembangan rata-rata tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2021 terlihat fluktuatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2021 sebesar 5,95 persen atau turun dibandingkan tahun 2020. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menunjukkan fenomena pengangguran yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa respons terhadap pemulihan ekonomi di setiap daerah juga berbeda-beda. Peningkatan persentase pengangguran terbuka di 8 kabupaten/kota yakni Kabupaten Cilacap dengan rata-rata TPT sebesar 8,02 persen, Tegal sebesar 8,70 persen, Banyumas sebesar 5,00 persen, Klaten sebesar 4,39 persen, Magelang sebesar 3,54 persen, Semarang sebesar 3,23 persen, Sragen sebesar 4,44 persen, dan Kota Magelang sebesar 6,63 persen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya permintaan pasar, kurangnya kemampuan, keterampilan dan kecepatan dalam mengikuti transformasi pekerjaan.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu negara akan memberikan dampak terhadap besarnya tingkat pengangguran karena semakin tinggi besaran tingkat upah yang ditetapkan akan menurunkan jumlah orang yang bekerja pada suatu negara tersebut (Hartanto & Masjkuri, 2017).

Grafik 1.1 Rata-Rata Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021(persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Seperti pada teori ekonomi Klasik yaitu fleksibilitas tingkat upah akan mewujudkan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja akan mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Para ahli ekonomi klasik berkeyakinan apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga pengangguran pada akhirnya dapat dihapuskan. Asumsi yang digunakan para ahli

ekonomi klasik yaitu, para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum, keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi marjinal (biaya untuk memproduksi tambahan produk baru) (Muchtolifah, 2016).

Mankiw et al. (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran yang dijelaskan melalui hukum Okun bahwa pengangguran dengan output memiliki pengaruh yang empiris. Output yang dihasilkan bergantung pada jumlah pekerja yang digunakan. Semakin besar jumlah pekerja yang digunakan maka output yang dihasilkan cenderung besar, sehingga kondisi ini cenderung dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Perubahan persentase dalam GDP riil sama dengan 3 persen kurang 2 kali perubahan dalam tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP riil tumbuh sampai kira-kira 3 persen, pertumbuhan normal ini mengacu ke pertumbuhan populasi, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selain itu, untuk setiap persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP riil turun sampai 2 persen. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 6 persen menjadi 8 persen maka GDP riil turun sebesar 1 persen.

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia. kualitas sumber daya yang rendah dapat berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dan menyebabkan pengangguran meningkat.

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut Hukum Okun (Okun's Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah. Bentuk hubungan negatif yang terjadi di Indonesia antara peningkatan (anggaran belanja) dengan kemiskinan dan pengangguran ini sejalan dengan pemikiran ekonom-ekonom aliran Keynesian. Dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan

multiplier effect pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi (Kemenkeu, 2014).

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini akan mengamati pengaruh Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Proporsi PDRB Sektor Pertanian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Jawa Tengah selama periode 2017-2021.

METODOLOGI

Untuk mengestimasi dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2017-2021. Digunakan alat analisis regresi data panel, dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$\log(TP)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log(AK)_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 \log(UMK)_{it} + \beta_4 \log(PP)_{it} + \beta_5 PE_{it} + \beta_6 PDRBP_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

TP	= Tingkat Pengangguran (Jiwa)
AK	= Angkatan Kerja (Jiwa)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (persen)
UMR	= Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)
PP	= Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)
PE	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
PDRBP	= Proporsi PDRB Pertanian (persen)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_6$	= Koefisien Regresi
i	= Observasi ke i
t	= Tahun ke t
log	= Logaritma Natural

Model ekonometrik di atas merupakan modifikasi dari model Yanti (2017), Yacoub & Firdayanti (2019) dan Panjawa & Soebagyo (2014). Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Proporsi PDRB Pertanian diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran. Sementara, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Kabupaten diduga memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran.

Data penelitian yang dipakai adalah data *time series* dari tahun 2017-2021 dan *cross section* di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi Tingkat Pengangguran (TP),

Angkatan kerja (AK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pertumbuhan Ekonomi (PP), Pengeluaran pemerintah (PP) dan Proporsi PDRB sektor pertanian (PDRBP).

Tahap estimasi model ekonometrik di atas akan meliputi: estimasi parameter model data panel dengan pendekatan *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM); pemilihan model estimator terbaik dengan uji Chow dan Uji Hausman dan jika diperlukan uji Lagrange Multiplier; uji kebaikan model pada model estimator terpilih; dan uji validitas pengaruh pada model estimator terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	-68,32622	-81,40384	-72,24592
LOG(AK)	-1,918056	0,897147	-0,275587
IPM	-0,083124	0,014770	0,001002
LOG(UMK)	6,123933	6,393663	6,359743
LOG(PP)	2,057303	-2,643058	-1,543766
PE	0,103927	0,243373	0,194397
PDRBP	0,004246	0,081708	0,039028
R^2	0,242549	0,810824	0,335999
Adjusted. R^2	0,215497	0,754354	0,312285
Statistik F	8,966075	14,35842	14,16864
Prob. Statistik F	0,000000	0,000000	0,000000
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(43,134) = 242,774627$; Prob. $F(34,134) = 0,0000$			
(2) Hausman			

Cross-Section random $\chi^2(6) = 19,781860$; Prob. $\chi^2(6) = 0,0030$

Sumber: BPS, diolah.

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa (*FEM*) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0000 ($< 0,01$) dan statistik χ^2 yang bernilai 0,0030 ($< 0,01$). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi *FEM*, terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi *FEM* eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0000 ($< 0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,810824; yang menunjukkan model terestimasi *FEM* memiliki daya ramal yang cukup tinggi. Secara terpisah dari enam variabel dalam model ekonometrik, ternyata hanya dua variabel saja, yakni variabel Upah Minimum Kabupaten (*UMK*) dan variabel Pengeluaran Pemerintah (*PP*), yang memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *t* masing-masing sebesar 0,0000 ($< 0,01$) dan 0,0558 ($< 0,10$).

Variabel Upah Minimum Kabupaten (*UMK*) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 6,393663 dengan pola hubungan linier-logaritma, Artinya, apabila Upah Minimum Kabupaten mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Tingkat Pengangguran akan mengalami kenaikan sebesar 0,06393663%, Sebaiknya, jika Upah Minimum Kabupaten mengalami penurunan sebesar 1%, maka Tingkat Pengangguran akan menurun sebesar 0,06393663%.

Tabel 2
Model Estimasi Fixed Effect Model (*FEM*)

$$\begin{aligned}
 TP_{it} = & -81,40384 + 0,897147 \log AK_{it} + 0,014770 IPM_{it} \\
 & \quad (0,7347) \quad \quad (0,3846) \\
 & + 6,393663 \log UMK_{it} - 2,643058 \log PP_{it} + 0,2433731 PE_{it} \\
 & \quad (0,0000)^* \quad \quad (0,0558)^{***} \quad \quad (0,7413) \\
 & + 0,081708 \log PDRBP_{it} \\
 & \quad (0,1317)
 \end{aligned}$$

$R^2 = 0,810824$; $DW = 2,405270$; $F = 14,35842$; Prob. $F = 0,0000$

Sumber: BPS, diolah. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$;
Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di
dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik *t*.

Variabel Pengeluaran Pemerintah (*PP*) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,643058 dengan pola hubungan linier-logaritma, Artinya, apabila Pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Tingkat Pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 0,02643058%, Sebaiknya, jika Pengeluaran Pemerintah mengalami penurunan sebesar 1%, maka Tingkat Pengangguran akan meningkat sebesar 0,02643058%.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa daerah dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kabupaten Tegal, yakni sebesar -77,026905, Artinya, terkait dengan pengaruh Agkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Proporsi PDRB Sektor Pertanian terhadap di

Provinsi Jawa Tengah cenderung memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Setelah Kabupaten Tegal, dua Kabupaten/Kota dengan konstanta terbesar adalah Kota Malang dan Kota Tegal.

Nilai konstanta terendah dimiliki oleh Kabupaten Semarang, yaitu sebesar -38,965053, Artinya, terkait dengan pengaruh Agkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Proporsi PDRB Sektor Pertanian terhadap di Provinsi Jawa Tengah cenderung memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Setelah Kabupaten Semarang, dua Kabupaten dengan konstanta terendah adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Kudus.

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah

No	Kabupaten/Kota	<i>Efek Wilayah</i>	Konstanta
1.	Kabupaten Cilacap	2,126384	-79,277456
2.	Kabupaten Banyumas	0,956811	-80,447029
3.	Kabupaten Purbalingga	-0,133363	-81,537203
4.	Kabupaten Banjarnegara	-0,160160	-81,564000
5.	Kabupaten Kebumen	1,145947	-80,257893
6.	Kabupaten Purworejo	-0,875359	-82,279199
7.	Kabupaten Wonosobo	-1,256633	-82,660473
8.	Kabupaten Magelang	-1,947215	-83,351055
9.	Kabupaten Boyolali	-1,513438	-82,917278
10.	Kabupaten Klaten	0,140055	-81,263785
11.	Kabupaten Sukoharjo	-0,604319	-82,008159
12.	Kabupaten Wonogiri	-2,501250	-83,905090
13.	Kabupaten Karanganyar	-0,830239	-82,234079
14.	Kabupaten Sragen	0,157085	-81,246755
15.	Kabupaten Grobogan	-1,889693	-83,293533
16.	Kabupaten Blora	-1,306738	-82,710578
17.	Kabupaten Rembang	-1,411181	-82,815021
18.	Kabupaten Pati	-1,083303	-82,487143
19.	Kabupaten Kudus	-2,302987	-83,706827

20.	Kabupaten Jepara	-0,705002	-82,108842
21.	Kabupaten Demak	-0,894704	-82,298544
22.	Kabupaten Semarang	-2,561213	-83,965053
23.	Kabupaten Temanggung	-2,103829	-83,507669
24.	Kabupaten Kendal	0,200663	-81,203177
25.	Kabupaten Batang	-0,295989	-81,699829
26.	Kabupaten Pekalongan	0,649634	-80,754206
27.	Kabupaten Pemalang	1,465239	-79,938601
28.	Kabupaten Tegal	4,376935	-77,026905
29.	Kabupaten Brebes	2,462905	-78,940935
30.	Kota Magelang	3,285560	-78,118280
31.	Kota Surakarta	1,763914	-79,639926
32.	Kota Salatiga	0,806669	-80,597171
33.	Kota Semarang	-0,289431	-81,693271
34.	Kota Pekalongan	0,993932	-80,409908
35.	Kota Tegal	4,134313	-77,269527

Sumber: BPS, Diolah

Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2021 ternyata dipengaruhi oleh Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengeluaran Pemerintah. Sementara, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Proporsi PDRB Pertanian tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran.

Tidak adanya pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran salah satunya disebabkan karena angkatan kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah penyebarannya tidak seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya menyebabkan tidak seimbangnya pemanfaatan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat penurunan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, meskipun jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun meningkat tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia maka output yang dihasilkan tidak akan mengalami perubahan, hal ini yang menyebabkan tingkat pengangguran cenderung tetap.

Anggoro (2015) juga menemukan bahwa angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Surabaya selama periode 2004-2013. Sementara, Arifin & Firmansyah (2017) menemukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Banten selama periode 2003-2021.

Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan karena dengan tingginya Indeks Pembangunan

Manusia yang memiliki sumber daya manusia belum tentu menjamin terserapnya tenaga kerja secara maksimal, karena Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi belum tentu sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang tersedia tidak dapat mengisi kesempatan yang ada. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Ibiyantoro (2022) juga menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Maluku selama periode 2007-2021. Helvira & Rizki (2020) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2008-2017.

Pengaruh positif Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan teori dari Keynes yang mengatakan penetapan upah di atas keseimbangan permintaan dan penawaran akan membuat perusahaan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja dan menurunkan perputaran tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kondisi ini mengindikasikan kenaikan rerata upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengakibatkan naiknya jumlah pengangguran dalam suatu wilayah. Hasil penelitian ini sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Pasalnya, peningkatan upah yang terus terjadi tiap tahunnya berimplikasi terhadap naiknya angka pengangguran di Indonesia.

Panjawa & Soebagyo (2014) juga menemukan upah berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Surakarta selama kurun waktu 1999-2013. Sementara, Zulhanafi et al., (2013) menemukan upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran di Indonesia periode 2000-2011.

Terdapatnya pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran yang mengindikasikan bahwasanya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat seperti belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur, maka akan berdampak terhadap peningkatan produksi output. Output yang meningkat akan meningkatkan permintaan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Dengan demikian keadaan seperti ini akan mendorong turunnya tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Keynes bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian akan membantu masalah ini. Salah satu bentuk campur tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*).

Mardiana et al., (2017) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2005-2014. Sementara Muslim (2014) menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2007-2012.

Tidak adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah disebabkan adanya pergeseran pertumbuhan ekonomi dari padat karya ke padat modal. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, biasanya orang akan berpindah ke sektor modal, namun jika pendidikan rendah menyebabkan tidak akan

terserap dan beresiko menambah komposisi lapangan kerja informal yang kurang berkualitas. Dibalik kinerja makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang membaik, ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama pengurangan pengangguran. Hal ini ditandai dengan masih stagnasinya sektor riil, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Perkembangan lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja.

Zulfa (2018) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Lhoseumawe selama periode 2008-2012. Sementara, Putri (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009-2013.

Sektor pertanian merupakan sektor penyerap lapangan pekerjaan terbesar di Provinsi Jawa Tengah sehingga setiap terjadi peningkatan Proporsi PDRB Pertanian diduga tingkat pengangguran akan menurun. Tidak signifikannya Proporsi PDRB Pertanian terhadap tingkat pengangguran disebabkan karena pemerintah daerah memprioritaskan alokasi Proporsi PDRB Pertanian untuk sektor lain berbeda tiap tahunnya sehingga Proporsi PDRB Pertanian tidak konsisten mengalami kenaikan tiap tahunnya bahkan cenderung turun atau fluktuatif. Selain itu, walaupun sektor pertanian merupakan sektor basis di kabupaten/kota Jawa Tengah kurangnya upah yang didapat melalui sektor pertanian menjadi salah satu hal kurangnya pengaruh Proporsi PDRB sektor pertanian terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengembangan sektor pertanian dalam menaikkan angka penyerapan tenaga kerja melalui penyuluhan pengelolaan pertanian untuk menunjang jumlah tenaga kerja serta memperhatikan kesejahteraan petani yang nantinya juga dapat mengurangi angka pengangguran.

Rompas et al., (2015) juga menemukan bahwa PDRB pertanian tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 2014. Sementara, Mustika & Emilia (2018) menemukan GDP pertanian tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 1993-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Tegal selama periode 2017-2021 memiliki konstanta tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak hanya menambah angka pengangguran dan berkurangnya kesempatan kerja di sektor formal, tetapi juga mereka yang bergerak di lini bisnis *start up* pun tidak luput dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Selain itu, gagalnya sejumlah investor berinvestasi di Kabupaten Tegal, karena kendala regulasi penetapan rencana tata ruang wilayah.

Sedangkan Kabupaten Semarang memiliki konstanta terendah di antara kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2017-2021. Rendahnya konstanta pada kabupaten tersebut dikarenakan Disnaker Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk mengupayakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan menyabot baik dan mengatur sedemikian rupa agar tak mem-PHK karyawan. Prestasi Kabupaten Semarang yang memiliki visi misi membangun Semarang sukses, beriman, berbudaya, berkeadilan, berdaya saing dan demokratis ini mensejahterakan 959.000 rakyatnya bukan tanpa bukti. Aneka inovasi, program dan kerja keras pihak terkait mampu menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten hingga 5,41 persen di tahun 2018.

SIMPULAN

Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai hasil terestimasi terbaik. Model terestimasi ini eksis dengan nilai koefisien determinasi (R^2) atau daya ramal cukup tinggi 0,81. Secara terpisah, Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan variabel Pengeluaran Pemerintah (PP) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran, sementara Angkatan Kerja (AK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Proporsi PDRB sektor pertanian (PDRBP) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berpengaruh positif terhadap pengangguran harus diwaspadai oleh pemerintah, karena naiknya Upah Minimum Kabupaten ternyata memicu naiknya pengangguran, yang bisa terjadi lewat pemutusan hubungan kerja, atau karena laju permintaan tenaga kerja lebih rendah dari laju penawaran tenaga kerja. Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan manusia yang cenderung memiliki pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, juga meniscayakan peninjauan terhadap *link and match* bidang pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja.

Pengeluaran Pemerintah yang memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran, menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah telah dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga signifikan menurunkan pengangguran, karena harus terus dievaluasi dan dipertajam.

Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran mesti diwaspadai, karena mungkin merupakan pertanda dari bergesernya kegiatan produksi menjadi lebih padat modal. Proporsi PDRB Pertanian yang juga cenderung berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, meski di satu sisi menunjukkan terjadinya kenaikan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, di sisi lain juga memperlihatkan sektor pertanian ke depannya sudah tidak bisa lagi diharapkan menjadi jaring pengaman terhadap problem pengangguran baik yang temporal atau berkelanjutan. Mengingat sektor pertanian tetap menjadi sektor strategis bagi upaya ketahanan pangan wilayah, sektor pertanian tampaknya perlu mendapatkan pengamatan yang lebih tajam dan mendalam untuk menentukan apakah kondisi ini final atau masih bisa diupayakan diubah dengan kebijakan tertentu terhadap sektor pertanian.

Referensi :

- Adediran, O. A. (2012). "An Assessment of Human Development Index and Millennium Development Goals Poverty Level as an Evidence of Unemployment in Nigeria". *International Journal of Politics & Economics*. 10(5), 132-139,
- Anggoro, M. H. (2015). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 3(3), 35-43.
- Alrayes, S. E & Wadi, R. M. A. (2018). "Determinants of Unemployment in Bahrain". *International Journal of Business and Social Science*. 9(12), 1-10.
- Aqil, M., Qureshi, M. A., Ahmed, R. R., & Qaderr, S. (2014). "Determinants of Unemployment in Pakistan". *International Journal of Physical and Social Sciences*. 4(4), 676-682.
- Arifin, S & Firmansyah. (2017). "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran di Provinsi Banten". *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*. 7(2), 20-30.
- Baek, J & Park, W. (2016). "Minimum Wage Introduction and Employment : Evidence from South Korea". *Elsavir*. 1(1), 18-21.

- Corolina, N. N & Panjawa, J. L. (2020). "Determinan Tingkat Pengangguran : Studi Kasus Wilayah Pengembangan Purwomanggung Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 9(1). 45-55.
- Fahrika, A. 1., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). "Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi Indonesia". *The International Journal of Social Sciences World*. 2(2), 110-116.
- Hardini, M. (2017). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal UNNESA*. 5(1), 1-5.
- Hartanto, T. B & Masjkuri, S. U. (2017). "The Effect Of Population, Education, Minimum Wage And Gross Regional Domestic Product On The Amount Of Unemployment In The Regency And City Of East Java 2010-2014". *JJET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 2(1), 20-29.
- Ibiyantoro, A. S. (2022). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku". *Skripsi*. Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Indayani, S & Hartono, B. (2020). "Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19". *Jurnal Perspektif*. 18(2), 201-208.
- Irawan, F. C.(2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2000-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 49-58.
- Jirang, A., Musa, A. H., & Wijaya, A. (2019). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur". *Journal FEB Unmul*. 1(1),1-10,
- Kemenkeu. (2014). "Dampak Belanja Pemerintah terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia", *Online*, Di akses 07 Nov 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/12/31/133039478508722-dampak-belanja-pemerintah-terhadap-pengangguran-dan-kemiskinan-di-indonesia>.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). "Pengantar Ekonomi Makro". Jakarta: Salemba Empat.
- Mahroji, D & Khasanah, I. (2019). "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten". *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*. 19(1), 51-72.
- Mahmood, T., Ali, A., Akhtar, N., Iqbal, M., Qamar, Serta., Nazir, H. Z., Abbas, N & Sana, I. (2014). "Determinants Of Unemployment In Pakistan: A Statistical". *International Journal of Asian Social Science*. 4(12), 1163-1175.
- Mardiana., Militina, T., & Utary, A. R. (2017). "Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat Kemiskinan". *Jurnal Inovasi*. 13(1), 50-60.
- Muchtolifah. (2016). "Ekonomi Makro". Surabaya: Unesa Press.
- Muslim, M. R. (2014). "Pengangguran Terbuka dan Determinannya". *Jurnal Ekonomi & Studi Pengangguran*. 15(2), 171-181.
- Mustika, C & Emilia. (2018). "Dampak Output GDP Sektor Pertanian terhadap Masalah Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Kemiskinan dan Pengangguran)". *Jurnal Paradigma Ekonomi*. 13(1), 22-28.
- Nugroho, R. E. (2016). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Indonesia Periode 1998-2014". *Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri*. 10(2), 1-10.
- Panjawa, J. L & Soebagyo, D. (2014). "Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 15(1). 48-54.
- Putri, R. F. (2015). "Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik". *Economics Development Analysis Journal*. 4(2), 175-181.

- Qotrunnada, L. (2017). "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini terhadap Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rompas, J., Engka, D & Tolosang, K. (2015). "Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04). 01-244.
- Saefulloh, E & Fitriana, R. (2017). "Pengaruh Inflasi, PDB, Investasi dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1999-2015". *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. 2(1), 1-10.
- Soebagiyo, D., Hasmarini, M. I., & Chuzaimah. (2005). "Analisis pengaruh kesempatan kerja, tingkat beban/tanggungan dan pendidikan terhadap pengangguran di Provinsi Dati I Jawa Tengah". *Jurnal ekonomi pembangunan*. 6(2), 163-186.
- Tagoe, C, O. (2022). "The Impact of Immigration on Unemployment and Wages in the United States: Evidence from Seven States". *Spring*, 1(1), 1-10.
- Tatli, H & Tasci, K. (2021). "The Short And Long-Term Relation Between Human Development And Female Unemployment: The Case Of Turkey". *Argumenta Oeconomica*. 2(47), 226-250.
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2015). "Economic Development". London: Pearson.
- Yacoub, Y & Firdayanti, M. (2019). "Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat". *Prosiding SATIESP*.
- Yanti, N. F. (2017). "Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014". *Jurnal Katalogis*. 5(4), 138-149.
- Zulfa, A. (2018). "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Visioner & Strategis*. 5(1), 1-10.
- Zulhanafi., Aimon, H & Syofyan, E. (2013). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3), 15-31.
- Zuliadi, A. (2016). "Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat". *Skripsi*, Universitas Teuku Umar Meulaboh.